

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan Kerja Praktek

Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Nunuy Nur Afiah, 2009: 4).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setidaknya meliputi laporan realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Abdul Hafiz Tanjung, 2008: 2).

Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, asas umum tersebut sesuai isi pasal 4 dari Peraturan Pemerintah dimaksud, yaitu : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi

yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Abdul Hafiz Tanjung, 2008: 18).

Pada tingkat Pemerintah Daerah reformasi pengelolaan keuangan ini terus berlanjut dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang mengharuskan penyajian anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (Abdul Hafiz Tanjung, 2008: 2).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Saragih, 2008).

Aplikasi SIPKD merupakan alat bantu yang dibangun berdasarkan regulasi pemerintah di bidang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Di samping dalam tahapannya juga mempertimbangkan aspek best practices pengelolaan keuangan yang berjalan di daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku secara umum telah diterapkan dalam bisnis proses yang ada dalam aplikasi SIPKD, termasuk di dalamnya adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berjenjang dan menjamin bahwa seluruh transaksi yang diproses telah diverifikasi secara otomatis dalam aplikasi secara konsisten. Sehingga data dan informasi yang dihasilkan lebih valid/akurat, transparan, tepat waktu dan dapat

dipertanggungjawabkan (accountable). (Iwa Karniwa ; Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jabar, 2014)

Penerapan SIPKD sendiri pertama kali dimulai pada 2009 lalu, dimana ujicoba dilakukan di beberapa OPD dengan versi beta dan diakhiri pada tahun 2010 dengan versi release. Selanjutnya pada 2010, kami menggelar penandatanganan Pakta Integritas dalam Pengembangan SPKD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) antara seluruh kepala OPD dengan Sekda. Lalu pada 2011, SIPKD diterapkan secara penuh pada modul penatausahaan dan modul gaji, sedangkan pada modul pertanggungjawaban baru diimplementasikan sampai menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dan pada 2012, implementasi SIPKD sudah menyempurnakan modul penatausahaan terutama untuk penatausahaan belanja PPKD dan penatausahaan Pendapatan. Penyempurnaan modul pertanggungjawaban yang dapat menghasilkan laporan keuangan. Sehingga LRA dan Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2012 sudah bisa dihasilkan dari SIPKD. Ini upaya dan kerja nyata. (Iwa Karniwa ; Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jabar, 2014)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat telah mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah sesuai dengan sistem pengolahan keuangan daerah yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan daerah pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat ini terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi, seperti terlambatnya pengajuan SPJ dari masing- masing Sub-Unit

Wilayah ke BPTPH, sering terjadinya koneksi *error* pada server SIPKD dari pusat karena banyak yang menggunakan dan mepalikasikannya sehingga memicu keterlambatan dalam realisasi anggaran dan pada saat pengajuan anggaran terkadang Bapak Kepala Balai sedang tidak berada di tempat (kantor BPTPH).

Berdasarkan hal di atas maka penyusun laporan Kerja Praktek ini mengambil judul **“Sistem Informasi Realisasi Anggaran Pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui :

1. Prosedur Sistem Informasi Realisasi Anggaran pada BPTPH Provinsi Jawa Barat.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Realisasi Anggaran pada BPTPH Provinsi Jawa Barat.
3. Upaya yang telah dilakukan BPTPH Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Realisasi Anggaran pada BPTPH Provinsi Jawa Barat.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Dengan adanya kerja praktek ini penulis mengharapkan hasil dari kerja praktek ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1.3.1 Kegunaan Praktis

Informasi – informasi yang berhasil dikumpulkan selama kerja praktek ini baik yang diperoleh dari instansi yang terkait, diharapkan akan memberikan manfaat bagi penulis, bagi perusahaan serta bagi pihak lainnya.

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan baik secara tertulis maupun praktek dilapangan mengenai Sistem informasi laporan realisasi anggaran khususnya dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), selain itu penulis dapat mengetahui prosedur mengenai laporan keuangan yang ada di instansi terkait.

2. Bagi Instansi

Secara langsung dapat terbantu dalam hal laporan keuangan mulai dari penginputan data ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kasir Umum, Buku Pembantu Pajak secara manual yang diinputkan kembali ke dalam sistem yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

3. Bagi Pihak lainnya

Laporan kerja praktek ini diharapkan dapat memberi kontribusi lebih kepada masyarakat mengenai laporan realisasi anggaran yang digunakan oleh instansi terkait.

3.3.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi UNIKOM

Berguna untuk mahasiswa UNIKOM secara umum dan khususnya untuk mahasiswa program studi akuntansi yang dijadikan sebagai dasar pemahaman lebih lanjut terhadap teori yang telah diperoleh pada perkuliahan yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dilaksanakan pada Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat di Bagian Keuangan, yang beralamat di Jl. Ciganitri II Pos. Bojongsoang Kabuptaen Bandung.

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP)

Waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek (KKP) ini dilaksanakan selama 29 hari sesuai dengan aturan yang ada di UNIKOM dan telah disepakati oleh Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, yang mana pelaksanaannya tanggal 8 Juli s/d 21 Agustus 2015 pada hari Senin sampai Jumat dari pukul 07.30-16.00 WIB.

Tabel 1.1
Tabel Aktivitas Kantor

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1	Kantor	Senin s/d Jum'at	07.30 s/d 16.00 WIB
2	Istirahat	Senin s/d Jum'at	12.00 s/d 13.00 WIB
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-

Tabel 1.2
Tabel Aktivitas Kerja Praktek

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1	Kerja Praktek	Senin s/d Jum'at	07.30 s/d 16.00 WIB
2	Istirahat	Senin s/d Jum'at	12.00 s/d 13.00 WIB
3	Libur	Sabtu s/d Minggu	-

Tabel 1.3
Tabel Kegiatan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Tahun 2015						
		Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
I	TAHAP PERSIAPAN							
	1. Permohonan surat kerja praktek							
	2. Pengajuan kerja praktek ke perusahaan							
	3. Persetujuan kerja praktek							
II	TAHAP PELAKSANAAN							
	1. Meminta surat pengantar Kepada perusahaan							
	2. Melaksanakan kerja praktek							
	3. Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan							
3	TAHAP PELAPORAN							
	1. Pengajuan judul							
	2. Bimbingan kerja praktek dengan Dosen pembimbing							
	3. Pembuatan data							
	4. Laporan kerja praktek							
	5. Pengumpulan laporan kerja Praktek							
	6. Sidang laporan kerja praktek							